



Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Keuangan Daerah pada APBD Kota Bandung Tahun 2023

Fikri Hidayat Aprian^{1*}, Anry Firmansyah²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: fikri22006@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 30-05-2026

Published: 08-06-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1567

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2023. Prinsip yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan APBD Tahun 2023. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran, belum optimalnya serapan belanja, serta perlunya penguatan aspek pengawasan dan koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kata Kunci: *Good Governance*, tata kelola keuangan daerah, APBD, transparansi, akuntabilitas.

A B S T R A C T

This study aimed to analyze the implementation of Good Governance principles in regional financial management through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Bandung City in 2023. The principles examined included transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in the processes of planning, implementation, and financial accountability. This study employed a descriptive qualitative approach using interviews, documentation, and literature review as data collection techni-

Acknowledgment



ques. The informants consisted of stakeholders involved in regional financial management within the Bandung City Government. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicated that the Bandung City Government had made efforts to implement Good Governance principles in managing the 2023 APBD. However, several challenges remained, including deviations between planning and budget realization, suboptimal budget absorption, and the need to strengthen supervision and coordination among regional agencies. This study provides practical contributions as an evaluation material to improve the quality of regional financial governance that is more transparent, accountable, effective, and efficient.

Key word: *Good Governance, regional financial management, APBD, transparency, accountability*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengelolaan keuangan daerah yang baik dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, salah satunya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



Meskipun demikian, implementasi prinsip *Good Governance* dalam praktik pengelolaan keuangan daerah belum selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan nilai APBD dari APBD murni menuju APBD perubahan yang menunjukkan adanya dinamika dalam proses penganggaran. Selain itu, realisasi belanja yang belum mencapai target mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan adanya kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Namun, opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas substantif pelaksanaan anggaran karena masih dimungkinkan adanya berbagai kendala dalam implementasi program serta pengelolaan sumber daya publik.

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan *Good Governance* pada tataran normatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian terhadap regulasi dan mekanisme formal. Kajian yang mengulas implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* secara empiris dalam pengelolaan APBD, khususnya pada pemerintah kota, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah Kota Bandung Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola keuangan daerah pada APBD Kota Bandung Tahun 2023 serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2023. Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung dengan fokus pada



implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan APBD Tahun 2023. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan mengenai implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan APBD. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan member check dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan kunci guna memastikan kesesuaian makna dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD Kota Bandung Tahun 2023.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta telaah terhadap dokumen pengelolaan keuangan daerah, implementasi prinsip *Good Governance* dalam tata kelola APBD Kota Bandung Tahun 2023 dianalisis melalui empat indikator, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan APBD Tahun 2023, peneliti menyajikan data perbandingan antara anggaran dan realisasi sebagai dasar dalam melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kota Bandung 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase
PENDAPATAN	Rp 7.284.364.470.476,00	Rp 6.905.926.043.905,00	94,80%
BELANJA	Rp 7.786.295.236.717,00	Rp 6.718.755.096.778,00	86,29%
TRANSFER	Rp 27.451.500.000,00	Rp 27.288.300.000,00	99,41%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp 7.813.746.736.717,00	Rp 6.746.043.396.778,00	86,34%
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 529.382.266.241,00	Rp 159.882.647.127,00	
PEMBIAYAAN NETO	Rp 529.382.266.241,00	Rp 529.382.643.727,00	100,00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp -	Rp 689.265.290.854,00	

Sumber: data diolah (2026)

Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD Tahun 2023 melalui penyediaan informasi keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut diwujudkan melalui publikasi dokumen anggaran dan laporan keuangan melalui media informasi resmi pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, upaya tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Meskipun demikian, implementasi transparansi masih menghadapi beberapa kendala. Informasi yang dipublikasikan umumnya bersifat teknis sehingga belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyajian informasi yang lebih sederhana dan komunikatif agar keterbukaan informasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Berdasarkan perspektif Public Financial Management (PFM), transparansi tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut. Dengan demikian, peningkatan kualitas penyajian informasi publik menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat daerah menyusun laporan



pelaksanaan anggaran yang selanjutnya menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun Pemerintah Kota Bandung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program yang pelaksanaannya memerlukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Dalam perspektif PFM, akuntabilitas menuntut adanya kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penguatan evaluasi berbasis kinerja perlu terus dilakukan agar pertanggungjawaban pemerintah daerah mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Efektivitas

Berdasarkan Tabel 2, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan. Meskipun demikian, sebagian besar program tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Belum optimalnya pencapaian realisasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan selama tahun anggaran, kendala teknis pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Namun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya agar program prioritas dapat berjalan dan pelayanan publik tetap terlaksana.

Dalam perspektif PFM, efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi antarperangkat daerah, serta evaluasi berkala terhadap capaian program menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.



Efisiensi

Data pada Tabel 2 juga menunjukkan adanya selisih antara anggaran dan realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan anggaran masih memerlukan optimalisasi agar output yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Upaya efisiensi telah dilakukan melalui pengendalian penggunaan anggaran serta penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah.

Namun demikian, belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa kegiatan menunjukkan adanya tantangan dalam aspek perencanaan teknis, koordinasi pelaksanaan, maupun proses administrasi. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan perspektif PFM, efisiensi menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara tepat. Dengan demikian, penguatan pengendalian internal, perbaikan perencanaan, serta optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan agar pengelolaan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam tata kelola APBD Kota Bandung Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dari aspek transparansi, Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan akses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai media dan sistem informasi. Namun, informasi yang disajikan masih cenderung bersifat teknis sehingga belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat.

Dari aspek akuntabilitas, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pengawasan internal maupun eksternal. Meskipun demikian, akuntabilitas berbasis kinerja masih perlu diperkuat agar pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, dari aspek efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan APBD Kota Bandung



Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi yang mengindikasikan belum optimalnya pencapaian target serta penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi antarperangkat daerah, pengendalian internal, serta evaluasi pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip *Good Governance* dalam tata kelola APBD Kota Bandung Tahun 2023 dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu terus melakukan perbaikan dalam aspek keterbukaan informasi, penguatan akuntabilitas berbasis kinerja, serta optimalisasi pengelolaan anggaran guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. H. (2015). *The International Handbook of Public Financial Management*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137335973>
- Andrews, M., Cangiano, M., Cole, N., De Renzio, P., Krause, P., & Seligmann, R. (2014). *This is PFM* (Working Paper No. 285). Harvard Kennedy School. <https://www.hks.harvard.edu/publications/pfm>
- Budiharjo, T., Pratomo, R., & Hapsari, D. (2024). Internal control effectiveness and regional budget efficiency: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Public Administration*, 46(3), 257–276. <https://doi.org/10.1080/02598272.2024.102344>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Engkus, E., Rahman, A., & Sari, N. (2024). *Good Governance* and efficiency in regional financial management in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 101–115.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik: Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Public financial management in practice: Guidance for governments*. OECD Publishing.



<https://doi.org/10.1787/9789264192607-en>

Rahmawati, S., & Arifin, Z. (2021). Implementasi prinsip efisiensi dalam pengelolaan APBD di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

Siregar, H. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD di pemerintah daerah Sumatera. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 33–48.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations. <https://www.undp.org/publications/governance-sustainable-human-development>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.